



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIANA SARI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **280720**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.342.580.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/968 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.995.700.000
2. Tanah Seluas 41 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 188.805.000
3. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 856.530.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 301.545.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.068.000.000**

1. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV RU5 1.8 RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ 2.8 GR SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.270.902.800****D. SURAT BERTAHAGA** **Rp. 171.586.416****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.397.243.399****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 1.425.403.053**

Sub Total **Rp. 12.675.715.668**



III. HUTANG

Rp. 1.283.928.668

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.391.787.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.